

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SUNGAI PENUH**

RETNO RENI, LISA EKA SILFIA, HERI SETIAWAN
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

retnoreni187@gmail.com

lisaekasilfia@gmail.com

herisetiawan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze flood disaster management by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sungai Penuh City. influence The method used in this study is a qualitative method. The data collection technique was carried out through observations made to selected informants such as the Secretary of the Sungai Penuh City BPBD, the Head of the Prevention and Preparedness of the Full River City BPBD, the Full River City BPBD Head of Emergency and Logistics, the Full River City BPBD Head of Rehabilitation and Reconstruction, and also the most rural communities cognate. The results of this study indicate that the analysis of flood disaster management by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sungai Penuh City is very good, but there are some aspects that are classified as not good, such as littering which can cause flooding in the expanse of Rawang sub-district.

Keywords: flood disaster management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota sungai penuh. pengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan kepada informan terpilih seperti Sekretaris BPBD kota sungai penuh, Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD kota sungai penuh, Kabid kedaruratan dan logistic BPBD kota sungai penuh, Kabid rehabilitasi dan rekontruksi BPBD kota sungai penuh, dan juga masyarakat desa paling serumpun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota sungai penuh sangat baik, tetapi ada beberapa aspek tergolong kurang baik seperti membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir di kecamatan hamparan rawang .

Kata kunci: Penanggulangan bencana banjir

I. PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam diantaranya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan angin topan. Korban bisa berupa perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, serta sosial ekonomi. Sebagai dampak dari terjadinya bencana, mengakibatkan mereka mengalami kendala dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Murdiyanto & Gutomo, 2015 437–452).

.Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dari tingkat nasional hingga daerah yang secara umum, peraturan ini telah mampu memberi keamanan bagi masyarakat dan wilayah Indonesia dengan cara penanggulangan bencana dalam hal karakteristik, frekuensi dan pemahaman terhadap kerawanan dan risiko bencana.

Dalam Wilayah Kota Sungai Penuh penanggulangan bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh, Berdasarkan Keputusan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana daerah pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi “Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah”. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh yang menjabat Kepala BPBD . Perda ini diharapkan menjadi solusi dalam penanggulangan bencana yang mungkin terjadi di wilayah kota sungai penuh.

Dalam meminimalisir dampak akibat bencana banjir, BPBD kota Sungai Penuh merupakan lini terdepan dalam mengendalikan dan menanggulangi resiko dan dampak bencana, terutama banjir. Masalah sarana dan prasarana penunjang perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja dari BPBD Kota Sungai penuh .Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir belum optimal dilakukan. Selain itu BPBD Kota Sungai penuh kekurangan orang yang kompeten di bidangnya hal ini dikarenakan BPBD memberikan pelayanan 24 jam non stop kepada masyarakat, sedangkan pegawai yang jaga dibagi per shift menjadi 8 orang hal ini membuat pelayanan yang diberikan kurang efisien, kurang efektif, dan kurang cepat tanggap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh tiap tahun terus berupaya dalam melaksanakan Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh khususnya pada Sungai Batang Merao. Upaya mengantisipasi dan mencegah potensi bencana banjir di Sungai Batang Merao Kota Sungai Penuh dibutuhkan peran dan sikap bersama Pemerintah, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan,

Dunia Usaha, dan Masyarakat. Setiap pihak dapat memberikan kontribusi pelayanan terhadap ancaman bencana, yang sangat dibutuhkan perannya dalam upaya penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.. Proses tanggap darurat dan pasca banjir tidak dijalankan dengan baik, tidak juga melaksanakan perbaikan infrastruktur akibatnya Masyarakat daerah sekitar Sungai Batang Merao masih belum terbebas dari banjir. Hal ini cukup menjelaskan bahwa Pemerintah Kota dan BPBD Kota Sungai Penuh belum maksimal dalam Penanggulangan Banjir. Sehingga wajar apabila Kota Sungai Penuh dijuluki dengan kawasan rawan banjir. Keberhasilan program dalam sebuah pekerjaan tidak akan menjadi efektif dan efisien apabila tidak ditunjang dan diimbangi dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi.

BPBD dibentuk atas dasar bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis, wilayah Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh rawan terhadap terjadinya bencana banjir dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana tersebut disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rangkaian bencana yang dialami wilayah Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi Fenomena dalam penelitian ini adalah :

1. Tiap Tahun di wilayah kecamatan hamparan rawang Sungai Batang Merao Kota Sungai Penuh Sering Terjadi Banjir.
2. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Belum Berhasil Sepenuhnya membebaskan banjir di sekitar wilayah kecamatan hamparan rawang Sungai Batang Merao Kota Sungai Penuh.
3. Di Kota Sungai Penuh sering di landa Banjir khususnya pada wilayah kecamatan hamparan rawang Sungai Batang Merao, faktor penyebab air sungai meluap adalah tingginya intensitas hujan terutama di hulu sungai.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Belum berperan secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Banjir.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH** “.

Pengertian Bencana

Bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 1 bencana adalah : “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Jenis-Jenis Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana dibagi atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Bencana alam Bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin topan, dll.
- b) Bencana non alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, dan terorisme.

Dampak Bencana

Menurut (Nurjanah dkk, 2013 : 32) Beberapa dampak bencana alam adalah sebagai berikut :

1. korban jiwa
Seringkali manusia tidak bersiap siaga menghadapi bencana alam. Akibatnya bencana alam seringkali menelan korban jiwa seperti :
 - a) Ada yang terbawa hanyut aliran air ketika banjir.
 - b) Ada yang meninggal akibat tersapu tsunami.
 - c) Ada yang cacat akibat terkena reruntuhan bangunan ketika gempa bumi.
2. Rasa trauma pada korban yang selamat
Bencana alam sering datang secara tiba-tiba. Bagi mereka yang selamat, berjuang agar tetap dapat hidup melawan bencana alam adalah pengalaman yang meninggalkan trauma. Trauma adalah rasa takut yang sangat dalam.
3. Kerugian harta benda
Dampak bencana alam terhadap harta benda antara lain :
 - a) Bencana alam sering menimbulkan kerusakan rumah.

- b) Ketika banjir terjadi banyak barang-barang yang terbawa hanyut.
 - c) Tsunami menghancurkan banyak rumah sampai batas rumah pun tidak ada.
4. Kerusakan lingkungan
Bencana alam seringkali terjadi secara meluas. Coba kita perhatikan ketika banjir terjadi. Pasti air banjir yang menyebar luas ke berbagai daerah. Ketika tsunami terjadi maka bukan hanya melanda daerah sekitar pantai namun daerah lain pun terimbas tsunami. Setelah bencana alam terjadi biasanya lingkungan menjadi rusak. Ekosistem di lokasi bencana alam terganggu. Habitat atau tempat hidup hewan dan tumbuhan menjadi hilang. Tanaman banyak yang roboh. Hewan banyak yang mati. Sumber air menjadi kotor.
5. Musnahnya hewan atau tumbuhan tertentu
Beberapa jenis hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup setelah terjadi bencana alam. Sumber air alami menjadi berkurang sehingga hewan dan tumbuhan menjadi mati.

Tujuan Penanggulangan Bencana

Menurut Keputusan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Ancaman Bencana
2. Menjamin Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Dan Menyeluruh
3. Menghargai Budaya Lokal
4. Membangun Partisipasi Dan Kemitraan Publik Serta Swasta
5. Mendorong Semangat Gotong Royong, Kesetiakawanan Dan Kedermawanan
6. Menciptakan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.

Tugas Dan Fungsi BPBD Kota Sungai Penuh Berdasarkan Perundang-Undangan No.1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana

a) Tugas-tugas yang dimiliki BPBD

1. Memberikan Pedoman Dan Pengarahan Terhadap Usaha Penanggulangan Bencana Yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat Bencana, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Secara Adil Dan Setara
2. Menetapkan Standardisasi Dan Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
3. Menyampaikan Informasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat
4. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Presiden Setiap Sebulan Sekali Dalam Kondisi Normal Dan Setiap Saat Dalam Kondisi Darurat Bencana

5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional Internasional
 6. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Yang Diterima Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
 7. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
 8. Menyusun Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b) Fungsi BPBD
1. Perumusan Dan Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Serta Persyaratan Dan Prosedur Perizinan Dan/Atau Rekomendasi Penyelenggaran Penanggulangan Bencana.
 2. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Dengan Bertindak Cepat Dan Tepat Serta Efektif Dan Efisien.
 3. Pengeordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Dan Menyeluruh.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana analisis penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota sungai penuh, hambatan yang ditemui dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan serentak dan upaya dalam penyelesaiannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Menurut Sugiyono (2019,18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana

Dalam menangani bencana Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana adalah dengan membuat desa tanggul bencana (DESTANA),memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan ancaman di desa tersebut, dilarang membuang sampah di sungai, dilarang mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai,membangun relasi di daerah sekitar dan membuat forum relawan bencana dengan mengidentifikasi dan membantu masyarakat melaporkan kepada tim BPBD.

Terselamatnya Sebanyak Mungkin Jiwa Pada Saat Keadaan Darurat Bencana.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat korban bencana banjir dalam segi materi berupa kerusakan rumah, sawah terendam, ternak mati, dan rusaknya infrastruktur jalan yang diakibatkan oleh bencana banjir.

Terpuhinya Sarana dan Prasarana, Sosial, Ekonomi Dan Produktivitas Sumber Daya Alam Pada Daerah Terdapat Pasca Bencana.

Dampak perekonomian warga sangat tergantung, ekonomi merosot yang dimana masyarakat mata pencariannya sebagai petani akibat banjir masyarakat jadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari dengan kerugian yang cukup besar oleh karena itu tim dari BPBD melakukan koordinasi terhadap dinas-dinas terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan obat-obatan.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tim dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Mengirimkan tim TRC (Tim reaksi cepat) yang beranggotakan 14-15 orang yang melaksanakan piket 1x24 jam yang dimana pada saat terjadinya bencana banjir masyarakat menghubungi tim TRC (Tim reaksi cepat) sehingga tim TRC turun kelapangan dengan membantu mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir, membantu kebutuhan masyarakat selama pengungsian dengan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan memberikan bantuan berupa beras, minyak, mie instan, air mineral dan obat-obatan. adapun hambatan dalam menangani bencana adalah kurangnya fasilitas atau alat yang tidak memadai, SDM (Sumber daya manusia) belum tercukupi seperti masyarakat meminta lebih dari tim BPBD punya.

Menurut kinerja BNPB tahun 2020, Strategi BNPB diarahkan untuk Penguatan Sistem, Regulasi, Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana, Adapun indikator Kinerja (BNPB, 2020 : 18) adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana di 19 lokasi
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PB memiliki sasaran peserta adalah ASN OPD Provinsi/Kab/Kota, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat.
2. Desa Tangguh Bencana di 120 lokasi
Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan program utama yang telah dimulai sejak tahun 2012. Destana tahun 2020 bertemakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami dan Covid-19 di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera yang membentang dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
3. Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Perumahan dan Infrastruktur. Kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pendampingan pelaksanaan Rehabilitasi dan

- Rekonstruksi (RR) pascabencana bidang fisik terhadap daerah yang terkena bencana masif.
4. Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 18 lokasi.
Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pendampingan dan pembinaan dalam aspek sosial ekonomi dan SDA. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat di wilayah pascabencana sehingga mampu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraannya.
 5. Pendampingan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebanyak 120 personil.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pascabencana dan R3P. Diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya ketika terjadi bencana massif untuk membantu tim dari BNPB.
 6. Layanan Budaya Sadar Bencana di 81 lokasi
Layanan Budaya Sadar Bencana merupakan Kegiatan pagelaran seni tradisional dalam diseminasi Penanggulangan bencana & Covid-19. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya dalam rangka meningkatkan budaya sadar bencana.
 7. Literasi Kebencanaan di 43 lokasi
Literasi kebencanaan merupakan kegiatan guna memberikan wawasan atau pengetahuan tentang kebencanaan dimana target tahun 2020 adalah sebanyak 43 kegiatan. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat webinar untuk kegiatan pendampingan daerah dan forum komunikasi menggunakan zoom meeting.
 8. Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB) di 8 lokasi
Implementasi program SPAB telah berjalan sejak tahun 2015 dengan berbagai strategi. Pada awalnya implementasi SPAB ini dilakukan secara langsung ke sekolah, warga sekolah tertentu mendapatkan bimbingan perihal bagaimana cara menerapkan SPAB di sekolah.
 9. Sistem Peringatan Dini di 6 lokasi
Sistem peringatan dini (Early Warning System-EWS) dapat digunakan untuk menghindari korban jiwa akibat bencana, yang pada akhirnya dapat menurunkan indeks risiko bencana nasional. Tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini ini adalah untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 10. Pengelola Infrastruktur Darurat sebanyak 100 personil.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup yang salah satu program prioritasnya adalah Penguatan Ketahanan Bencana dan kemudian diadaptasi dalam kegiatan BNPB yaitu Manajemen Penguatan Kedaruratan. Pada tahun 2020,
 11. Pendampingan penanganan korban dan mengungsi sebanyak 570 orang.

- Kegiatan Pendamping penanganan korban dan pengungsi berupa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD provinsi/kab/kota. Tahun 2020,
12. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan sebanyak 105 orang.
Metode kegiatan Pendampingan Teknis Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana dan Keposkoan menekankan pada upaya yang mendorong peran serta aktif peserta secara penuh
 13. Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB di 144 lokasi
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB untuk memenuhi ketersediaan logistik dan peralatan baik dipusat maupun di daerah. Dukungan logistik PB dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD di daerah maupun bantuan darurat dilaksanakan melalui pengadaan barang logistik guna memenuhi kebutuhan bufferstock daerah pada kegiatan penanggulangan bencana.
Kedepannya, BNPB beserta jajarannya akan terus berupaya optimal dalam kegiatan penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam dengan tantangan dilapangan yang tidak mudah namun tetap menjaga optimisme dalam setiap kesempatan.

V. KESIMPULAN

1. Indikator Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana.
Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana dengan membuat desa tanggul bencana (DESTANA), memberikan edukasi kepada masyarakat dilarang membuang sampah disungai, dilarang mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai dan membuat forum relawan bencana dengan mengidentifikasi dan membantu masyarakat melaporkan kepada tim BPBD.
2. Indikator Terselamatnya Sebanyak Mungkin Jiwa Pada Saat Keadaan Darurat Bencana.
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menemukan korban bencana banjir dalam segi materi berupa kerusakan rumah, sawah terendam, ternak mati, dan rusaknya infrastruktur jalan.
3. Indikator Terpulihnya Sarana dan Prasarana, Sosial, Ekonomi Dan Produktivitas Sumber Daya Alam Pada Daerah Terdapat Pasca Bencana.
Berdasarkan hasil wawancara diatas Terpulihnya Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi Dan Produktivitas Sumber Daya Alam bahwa perekonomian merosot, aktivitas terhambat karna mata pencarian masyarakat bertani disawah akibat banjir masyarakat terhalang melakukan aktivitas dengan kerugian yang cukup besar.
4. Indikator Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tim dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Mengirimkan tim TRC (Tim reaksi cepat) yang beranggotakan 14-15 orang,pada saat terjadinya bencana banjir masyarakat menghubungi tim TRC sehingga tim TRC (Tim reaksi cepat) turun kelapangan dengan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan memberikan bantuan berupa beras,minyak,mie instans,air mineral dan obat-obatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ferdiansyah 2020, Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencan Daerah
- IDEP. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Bali: IDEP; 2007
- Murdiyanto, & Gutomo, T. (2015). Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan. *Jurnal PKS*, 14(4), 437–452.
- Nurjanah, dkk (2013 : 20-32) Manajemen Bencana Bandung: ALFABETA
- Rahayu. DAKk. (2009). Banjir dan upaya Penanggulanganya. Bandung : Pusat Migitasi
- Sumarno, Bambang. 2011. *Kita dan Bencana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono,2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012, Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana. Team BNPB. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh
- Ps 2PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
- Perka BNPB No 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Peraturan presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- Menurut kinerja BNPB TAHUN 2020 Indikator penanggulangan bencana